

**PERKEMBANGAN KELUARGA DALAM
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN :
SUATU ANALISIS TENAGA KERJA WANITA
DAN PERMASALAHANNYA DALAM
MASYARAKAT INDONESIA**

Oleh :
Prof.Dr. Pudjiwati Sajogyo
(Tim PSW LP-IPB)

Disampaikan pada seminar:
**Keluarga Menyongsong Abad XXI dan Peranannya
Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia**
21-22 September 1993, Kampus IPB Darmaga Bogor

**PERKEMBANGAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN: SUATU ANALISIS TENAGA KERJA
WANITA DAN PERMASALAHANNYA
DALAM MASYARAKAT INDONESIA**

Oleh :
Pudjiwati Sajogyo

1. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk yang pesat bagi Indonesia menimbulkan masalah penting dalam mengembangkan peluang bekerja untuk angkatan mudanya, pria dan wanita, khususnya mereka dari keluarga dan rumahtangga miskin.

Dengan jumlah penduduk sebesar 147.5 juta (lebih dari 50 persen adalah wanita) serta tenaga kerja sebesar 51.5 juta, pada tahun 1980, berarti telah terjadi peningkatan sebesar 2.32 persen dengan pertumbuhan tenaga kerja 2.8 persen, disamping penyebaran penduduk yang tidak merata: konsentrasi penduduk yang tinggi terdapat di pulau Jawa, yang luasnya hanya kira-kira 7 (tujuh) persen dari seluruh daratan di Indonesia dan besarnya penduduk meliputi kira-kira 62 persen dari seluruh penduduk (kepadatan penduduk di pulau Jawa pada tahun 1980 kira-kira 700 orang per km²) Sajogyo *dkk.*, 1985). Dalam periode 1971-1980 ternyata terjadi penurunan tenaga kerja di bidang pertanian, yaitu dari 63 persen menjadi 56 persen, dengan "*growth index*" sebesar 0.57 dibandingkan dengan sektor-sektor lain (pertambangan, industri, listrik, bangunan, perdagangan, bank dan jasa). Di lain pihak, data tahun 1980 bagi daerah pedesaan Indonesia menunjukkan bahwa 67.1 persen dari tenaga kerja yang ada bekerja di bidang pertanian dengan pertumbuhan 0.7 persen selama kurun waktu 1970-1980; hal ini adalah rendah jika dibanding dengan pertumbuhan rata-rata dari tenaga kerja di pedesaan. Pada tahun 1980, bidang pertanian masih mampu menyerap 24 persen tenaga kerja pedesaan yang baru. Ternyata tenaga kerja yang baru itu sebagian besar telah diserap, khususnya oleh tiga bidang, yaitu: sektor dagang, jasa dan industri, yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 5 persen, suatu perkembangan yang cukup sehat walaupun ditandai oleh suatu masalah, yaitu adanya pengangguran tersembunyi (*disquised unemployment*) sebesar 10 persen di

antara pria dan 15 persen di antara wanita. Dalam kurun waktu 1971-1980, sebanyak 35 persen dari peningkatan seluruh tenaga kerja, yaitu sebesar 11.2 juta, telah diserap oleh tenaga kerja perkotaan yang menunjukkan '*growth rate*' sebesar 5.8 persen di sektor jasa, dagang dan industri, seperti halnya pada daerah pedesaan.

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang masih agraris kini sedang menuju ke masyarakat industri. Memperhatikan perkembangan sejarah kita, modernisasi ternyata berkembang pada masyarakat kita namun tidak dibarengi dengan perkembangan industrinya, seperti yang dialami negara-negara yang sudah maju sejak 100 tahun yang lalu.

Dalam konteks proses perubahan tersebut berarti bahwa berbagai permasalahan terutama di bidang pendidikan, kesehatan/gizi, ketenagakerjaan yang dihadapi wanita dengan jumlah lebih dari separuh penduduk itu, perlu dan "wajar" untuk dikaitkan secara langsung dan integratif dengan program dan proyek pembangunan; dimulai dari tingkat kebijaksanaan di pusat sampai tingkat kebijaksanaan lokal, sesuai dengan operasionalisasi dari "statement" konstitusional (GBHN 1978, 1983 dan GBHN 1988 dalam Pudjiwati Sajogyo, dkk., 1988).

Tanpa menangani secara tuntas khususnya permasalahan tersebut, akan nampak dampak yang tidak kita inginkan di kemudian hari bagi perkembangan warga masyarakat sebagai penerus bangsa ini.

"Pendidikan" modern dengan masuknya pengaruh masyarakat Barat (penjajahan) lebih dulu menjangkau kaum prianya dari kaum wanitanya. Tidaklah mengherankan jika kini di samping tiga pria, baru ada seorang wanita kita terjangkau oleh pendidikan modern itu ! Mengapa hal ini penting untuk dipermasalahkan ? Tidak lain karena dalam menyongsong era industri, nilai pendidikan modern itu nampak lebih mampu membawa perbaikan hidup dalam masyarakat, lebih-lebih bagi rumahtangga yang marginal dan miskin itu: tidak saja bagi prianya, tetapi juga terhadap wanitanya. Penguasaan tanah yang luas seperti di daerah luar Jawa tanpa dibarengi dengan penguasaan teknologi yang maju memberikan dampak yang sama: belum mampu memberikan kehidupan yang layak secara menyeluruh bagi masyarakat kita. Padahal pendidikan modern merupakan dasar bagi pengembangan industri yang maju.

Permasalahan yang dihadapi wanita di bidang kesehatan/gizi, jelas pula bersumber pada permasalahan pendidikan dan perekonomian keluarga/

rumahtangga, lebih-lebih pada masyarakat pedesaan (pertanian) itu. Nampak dengan jelas dari berbagai informasi yang diperoleh dari data sensus pertanian dan sensus penduduk untuk periode 1973-1988, bahwa masih ada peningkatan sejumlah rumahtangga petani, dari 14 juta menjadi 17 juta rumahtangga atau meliputi 2.8 persen per tahun. Jumlah petani yang marginal menguasai kurang dari 0.5 hektar, masih meningkat dari 6.6 juta menjadi 11.0 juta rumahtangga. Rumahtangga yang tidak memiliki tanah dan mereka yang menggarap tanah kepunyaan orang lain meningkat dari 0,49 juta menjadi dua juta menjadi dua juta rumahtangga (Sajogyo dkk, 1985).

Permasalahan "perekonomian" rumahtangga tersebut jelas tidak dihadapi oleh pria sebagai kepala rumahtangga saja tetapi juga oleh wanita sebagai ibu rumahtangga (kecuali pada rumahtangga yang dikepalai oleh wanita/femaleheaded households, yang jumlahnya meliputi 4,6 juta rumahtangga pada tahun 1985 karena masalah perekonomian rumahtangga ditanganinya sendiri sebagai konsekwensi biologis pada peranannya sebagai ayah dan ibu rumahtangga sekaligus).

Masalah "integrasi" wanita khususnya dari keluarga/rumahtangga miskin dalam pembangunan pedesaan khususnya, nyata dari data penelitian tingkat makro (sensus penduduk/pertanian, industri dan sebagainya) serta data penelitian tingkat mikro/studi kasus, yang menunjuk adanya proses partisipasi wanita dalam ketenagakerjaan (ekonomis).

Proses integrasi tersebut tidak saja terjadi di tingkat keluarga/rumahtangga tetapi cukup nyata di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat luas desa dan kota, (pertanian; industri tercakup manufaktur; jasa termasuk dagang, transport dan sebagainya) (M. Oey Gardiner, 1984).

Data makro yang mendukung "partisipasi" wanita dalam ketenagakerjaan dalam Sensus Penduduk (Biro Pusat Statistik, 1980) menurut Sajogyo (1985) ternyata kurang komplit: tidak menyentuh pekerjaannya yang demikian beragam (multiple jobs) oleh wanita sebagai sumber pendapatan rumahtangga serta tidak menyentuh pula kenyataan yang ada, yaitu, peran ganda wanita, yang mencurahkan tenaga/waktu dalam mengurus pekerjaan rumahtangga dan pekerjaan yang menghasilkan nafkah, khususnya bagi mereka dari keluarga/rumahtangga miskin.

Berbagai data studi mikro sejak tahun 70-an, secara nyata mendukung fakta sosial tersebut (social facts). Bahkan sejumlah penelitian di Jawa dan luar Jawa (Pudjiwati Sajogyo 1983; 1987) menunjukkan bahwa rumah-

angga yang miskin lebih menunjukkan adanya ketergantungan pada pendapatan wanita sebagai individu untuk "survival" rumahtangganya, sedangkan rumahtangga yang lebih mampu menunjukkan ketergantungannya pada pendapatan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan dan status sosial rumahtangganya.

Kesimpulan penting dari penelitian-penelitian tersebut berdasarkan partisipasi wanita sebagai tenaga kerja (sebagai pengusaha pertanian/non pertanian, buruh tani, buruh pedagang dan sebagainya) adalah sebagai berikut:

"Setiap perubahan yang menggeser (displace) wanita dari pekerjaannya yang ada tanpa mengisinya (substituting) dengan kesempatan pemberian nafkah yang baik dan juga tanpa menyertainya dengan sistem administrasi yang membantu menjangkau sumber berbagai kemudahan (seperti kredit, training, ketrampilan dan sebagainya), maka gejala ini berarti bahwa hal tersebut "melukai" khususnya rumahtangga yang miskin".

Kebijaksanaan yang lebih mementingkan penyediaan kesempatan kerja bagi pria dari pada untuk tenaga kerja wanita berarti proses itu memperbesar jurang pemisah (gap) antara rumahtangga yang kaya dengan yang miskin". Jurang pemisah ekonomis termasuk ketenagakerjaan di Indonesia masih terdapat antara daerah pedesaan dan perkotaan (Sajogyo dkk. 1985).

Jelaslah, bahwa pendekatan yang mendasar dalam pengintegrasian tenaga kerja wanita dalam pembangunan (Sajogyo, 1985) adalah:

- a. Untuk mengerti keadaan ekonomi masyarakat Indonesia, hendaknya mempelajari dulu keadaan politik dan kehidupan masyarakatnya.
- b. Jika ingin mengerti keadaan politik dan kebudayaan masyarakat Indonesia, maka terlebih dulu harus mempelajari ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa pengintegrasian tenaga kerja wanita dalam pembangunan kini adalah pendekatan yang utuh meliputi aspek-aspek ekonomis, kebudayaan, politik dan biologis (kOdrat), dalam lingkungan (ekologi) yang berbeda-beda pula.

2. Perubahan Perilaku dan Hubungan dalam Keluarga pada Masyarakat Indonesia yang sedang Berubah : dari Pertanian ke Industri

Memang nyata bahwa proses sosialisasi dalam keluarga inti pada dasarnya mengembangkan sikap, perilaku bermasyarakat yang dikehendaki oleh lingkungan sosialnya sejak dini bagi seseorang manusia. Secara historis sosialisasi anak ke dalam peranan yang diajarkan lingkungannya bagi seorang wanita dan pria (peranan seksual) berakar pada adanya pembagian kerja dalam kelompoknya untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup dalam aspek-aspek biologis, ekonomis dan sosial seperti dinyatakan oleh Saparinah Sadli (1988).

Tetapi pembagian kerja tipe tersebut di atas yang mengembangkan peranan seksual yang tajam dalam hubungan pria dan wanita kini sedang mengalami perubahan (Pudjiwati Sajogyo, 1983, 1987) : baik pria maupun wanita melakukan pekerjaan nafkah dan pekerjaan mengurus rumahtangga.

Di dalam lingkungan sosial budaya yang telah dan sedang mengalami "industrialisasi", yang bertolak dari pertanian khususnya dan di mana kekuatan fisik untuk berperanan atau berekja menjadi kurang penting, dasar terjadinya dikhotomi atau bifurkasi kepribadian model pria dan wanita menurut Saparinah Sadli menimbulkan anggapan dalam masyarakat bahwa hal tersebut membatasi perkembangan potensi seseorang; ada kecenderungan pembagian kerja seksual mengalami pergeseran dan tidak setajam atau sejelas tipe yang lama: pembagian kerja seksual kurang jelas digolongkan sebagai khas pria atau khas wanita. Hal ini tentunya mempengaruhi kebiasaan dalam proses sosialisasi anak sehubungan dengan pembentukan peranan seksualnya. Sebagai contoh adalah bahwa orang tua dalam keluarga inti kini membiasakan anaknya, baik anak laki-laki maupun anak wanitanya menegerjakan kegiatan mengurus pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, mengambil air, mengasuh anak/adik, berbelanja dan sebagainya). Seperti diketahui, dalam masyarakat luas masih ada anggapan bahwa kebiasaan melakukan pengurusan pekerjaan rumahtangga yang erat hubungannya dengan kegiatan reproduksi seharusnya dilakukan oleh "Wanita" sebagai isteri/ibu rumahtangga dan dimasukkan sebagai peranan wanita.

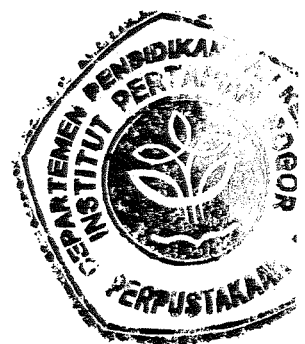


Saparinah Sadli menekankan, bahwa pembagian kerja antara wanita dan pria yang tidak jelas batas-batasnya sama sekali tidak berarti bahwa dalam pengasuhan tidak perlu lagi dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Deseksualisasi dalam pengasuhan anak justru akan menimbulkan berbagai konflik internal dan eksternal bila tidak diikuti dengan proyeksi dan wawasan yang mendalam tentang makna perubahan peranan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Konflik juga dapat timbul bilamana hasil proses sosialisasi yang berlangsung di dalam keluarga tidak dapat diterapkan dalam lingkungan sosial (masyarakat) yang lebih luas karena sistem nilai yang sangat berbeda.

3. Pendekatan Pengembangan Peranan Masyarakat Yang sedang berubah dari Pertanian ke Masyarakat Industri di Indonesia*)

Suatu pendekatan, konseptual dan metodologis, yang menjelaskan perilaku ekonomis keluarga/rumahtangga dalam masyarakat yang masih agraris sangat penting untuk mengerti perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita yang sedang membangun. Sasaran perubahan tentulah keluarga/rumahtangga yang terdiri dari sejumlah anggota pemebri tenaga kerja dalam proses produksi dan lain-lain kegiatan pencarian nafkah. Tenaga kerja itu terdiri dari laki-laki dan wanita dewasa maupun anak-anak yang dianggap cukup ,mampu melaksanakan sesuatu pekerjaan.

Suatu studi mendalam yang telah membuka cakrawala baru dalam penelitian sosial mengenai "ALOKASI WAKTU' atau "CURAHAN TENAGA KERJA" di bidang pertanian dan non pertanian di pedesaan Jawa selama 1 (satu) tahun, untuk pertama kali dilakukan oleh White dalam usahanya untuk mengerti "nilai ekonomis" dari anak (White, 1976). Metode lapang dari penelitian white itu yang kemudian dikembangkan dan didukung oleh sejumlah konsepsi ekonomi, sosiologi dan antropologi berusaha untuk mengerti dan menjelaskan peranan wanita dalam keluarga, rumahtangga dan masyarakat luas, dalam arti, penelitian mempermasalahkan peranan dan status sosial wanita dalam "hubungan pria dan Wanita" (gender relationships).



Dalam hal ini penelaahan permasalahan dititikberatkan pada analisis perekonomian rumahtangga pedesaan, memakai pendekatan "Structural Functionalism" dari Marion J. Levy bersumber pada pemikiran Talcott Parsons yang memakai pendekatan "neo-evolutionism" dengan analisis strukturnya untuk menungkapkan perubahan yang terjadi dalam keluarga dan masyarakat luas (Pudjiwati Sayogyo, 1988). Penelitian tersebut yang dilakukan selama satu tahun di dua desa daerah Jawa barat (1977 - 1987) oleh Tim dari IPB Bogor dan studi Dinamika Pedesaan Survei Agro Ekonomi Bogor memakai metode survai bulanan terhadap sejumlah rumah-tangga sampel dengan disertai metode kualitatif. Perlu pula dikemukakan bahwa studi tersebut dilakukan dalam konteks proyek "Peningkatan Partisipasi Wanita dalam Pengembangan Pedesaan" oleh FAO/SIDA.

Sejak tahun 1981 (sampai 1987) penelitian di Jawa barat dikembangkan ke daerah lain, baik di pedesaan Jawa maupun pedesaan di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Ambon Nusa Tenggara Timur dan Jawa. Dalam penelitian ini dipakai pendekatan yang sama, baik konseptual maupun metodologis seperti yang dilakukan dalam penelitian di Jawa barat mengenai permasalahan yang sama. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh "Variasi" dari kenyataan yang ada mengenai peranan atau status sosial wanita dalam pembangunan, mengingat masyarakat Indonesia yang plural itu, yang menunjukkan perbedaan dalam aspek-aspek ekologi, struktural, ekonomi, maupun kultural.

Dengan mengembangkan jaringan kerjasama dengan sejumlah Universitas di Indonesia, data yang diperoleh dari masyarakat setempat melalui para peneliti dari berbagai disiplin ilmu (pertanian, peternakan, ekonomi, hukum, pendidikan dan perguruan, sastra, sosial politik, sosiologi pedesaan, antropologi, psikologi dan ketatanegaraan), diharapkan dapat digunakan para perencana dan pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi wanita khususnya dalam aspek ketenagakerjaan.

*) Berdasarkan Penelitian mengenai "Peranan wanita Pedesaan Dalam Pembangunan, 1982 - 1987 di Indonesia" Oleh Pusat Studi Pembangunan IPB Bogor bekerjasama dengan 17 Universitas di 14 Propinsi dengan Dana dari Food Foundation New York-Jakarta.

Dengan mengembangkan peranan wanita (selalu dalam hubungan pria dan wanita) yang mencerminkan peningkatan status sosial wanita, khususnya di pedesaan dalam masyarakat yang sedang membangun, berarti bahwa hal tersebut mengarah kepada peningkatan integrasi wanita dalam pembangunan kini.

Dengan demikian analisis peranan wanita pada dasarnya dititikberatkan pada 3 (tiga) hal yaitu :

- (a) Pola integrasi wanita dalam hal produksi (bekerja nafkah) yang langsung menghasilkan (cash atau natura).
- (b) Pola integrasi wanita dalam hal pekerjaan yang tidak langsung menghasilkan, sejumlah tercakup dalam proses reproduksi (mengurus pekerjaan rumah-tangga).
- (c) Partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, berbagai permasalahan dapat ditelaah secara khusus yaitu : Wanita dan Kerja serta Wanita dan Keluarga (Rumah-tangga) yang ada hubungannya dengan aspek Kependudukan, Pola Kebudayaan Pemakaian Teknologi tepatguna serta aspek Pendidikan/penyuluhan, dengan membandingkan peranan wanita pada beragam lapisan/golongan di pedesaan.